

**TELAAH SINERGITAS FUNGSI SOSIAL *BAITUL MAAL* DAN FUNGSI
BISNIS *BAITUL TAMWIL* PADA KANINDO SYARIAH**

SKRIPSI

Disusun oleh :

MUHAMMAD RIJALLUDIN

115020507111022

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul :

"Telaah Sinergitas Fungsi Sosial Baitul Maal dan Fungsi Bisnis Baitul
Tamwil pada Kanindo Syariah "

Yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Rijalludin
NIM : 115020507111022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **13 Juli 2018** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Asfi Manzilati, SE., ME.
196809111991032003
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Multifiah, SE., MS.
195505271981032001
(Dosen Penguji I)
3. Dr. Iswan Noor, SE., ME.
195907101983031004
(Dosen Penguji II)

Malang,
Ketua Program Studi
Ekonomi Islam

Arief Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
NIP 1970009221995121002

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Telaah Sinergitas Fungsi Sosial Baitul Maal dan Fungsi Bisnis Baitul
Tamwil Pada Kanindo Syariah

Yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Rijaludin
NIM : 115020507111022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis I Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua Program Studi
Ekonomi Islam

Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
NIP.197009221995121002

Malang,
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Dr.Dra.Astij Manzilati, ME.
NIP. 196809111991032003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Muhammad Rijalludin**
 Tempat, tanggal lahir : **Surabaya, 14 februari 1991**
 NIM : **115020507111022**
 Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
 Konsentrasi : **Ekonomi Islam**
 Alamat : **Perum Bumi Asri Sengkaling Blok L-11, DAU**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Telaah Sinergitas Fungsi Sosial Baitul Maal dan Fungsi Bisnis Baitul Tamwil Pada Kanindo Syariah

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing,

Dr.Dra.Asfi Manzilati, ME.
 NIP.196809111991032003

Malang,

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Rijalludin
 NIM.115020507111022

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Islam

Arif Hestoro, SE., MT., Ph.D.
 NIP 197006221995121002

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rijalludin lahir di Surabaya 14 februari 1991. Anak kedua dari tiga bersaudara ini adalah anak dari pasangan Ir.Hari Sumarsono dan Insiani . Penulis tamat sekolah di SD Muhammadiyah 08 Dau Pada Tahun 2003 di Jetis,Kec Dau tamat SMP pada tahun 2006 di MTs Negeri 1 Malang Jl Bandung Kota Malang ,dan tahun 2009 tamat dari Man 1 Malang,Tlogomas.sempat

melanjutkan program D2 bahasa Arab di Solo tamat tahun 2011 dan Pada tahun 2011 penulis mengikuti tes ke Univ. Brawijaya dan di terima melalui jalur SPMK Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Ekonomi Islam. Penulis berharap ilmunya dapat bermanfaat dikemudian hari.

ABSTRAK

Baitul maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan institusi. Kanindo adalah salah satu model paling sederhana dari lembaga keuangan syariah yang saat ini muncul dan tenggelam di Indonesia. Keberadaan beberapa LKS dengan

jumlah yang signifikan di beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor pendukung yang memungkinkan untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana Kanindo Syariah dalam menjalankan fungsi-fungsi yang ada di Baitu Mal dan Baitul Tamwil, dan sinergi di antara mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersumber dari data primer. Penentuan informan menggunakan nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini sebenarnya di BMT Kanindo Syariah tidak berjalan sinergis. Fungsi yang lebih dominan yang digunakan adalah fungsi bisnis. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan adalah dengan menyiapkan infrastruktur pendukung guna meningkatkan manajemen. Penting untuk meningkatkan baik manajemen pribadi, staf, dan karyawan untuk meningkatkan kapasitas personel untuk memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam lembaga keuangan syariah.

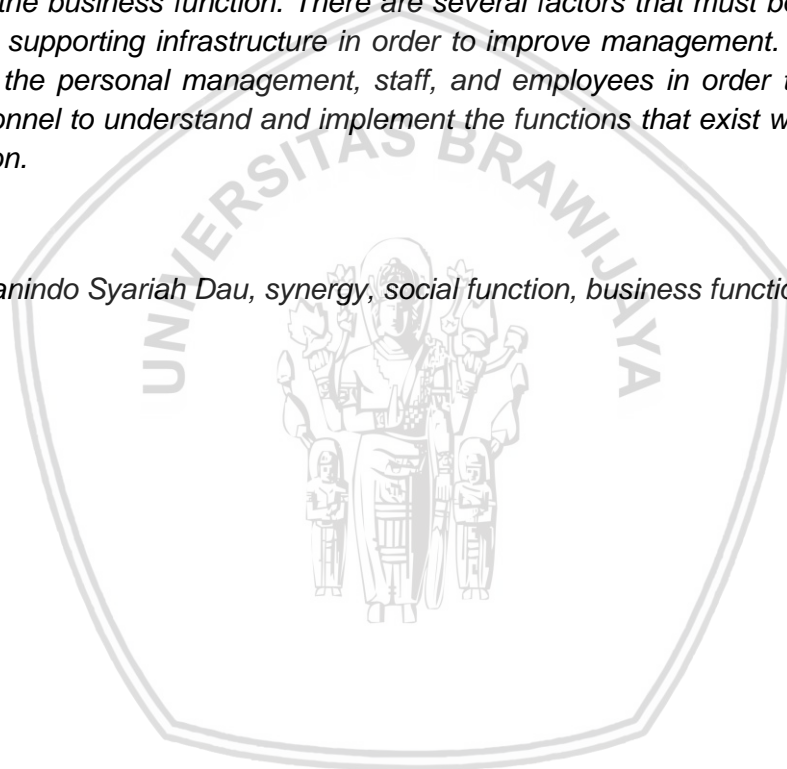
Kata kunci: PT Kanindo Syariah Dau, sinergi, fungsi sosial, fungsi bisnis



ABSTRACT

Baitul maal wa Tamwil is a financial institution with the concept of sharia which is born as an option that combines the concept of maal and tamwil in one institution activity. Kanindo is one of the simplest models of sharia financial institutions that currently appear and drown in Indonesia. The existence of several LKS with significant amount in some regions in Indonesia is not supported by supporting factors that allow to keep developing and running well. The researcher aims to explore how far Kanindo sharia in carrying out the functions that exist in Baitu Mal and Baitul tamwil, and the synergy between them. This research uses qualitative research approach and sourced from primary data. Determination of informants using nonprobability sampling with purposive sampling method. The result of this research is in fact in BMT Kanindo Syariah not running synergy. The more dominant function used is the business function. There are several factors that must be considered is by preparing the supporting infrastructure in order to improve management. It is necessary to improve both the personal management, staff, and employees in order to increase the capacity of personnel to understand and implement the functions that exist within the sharia financial institution.

Keywords: *PT Kanindo Syariah Dau, synergy, social function, business function*



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Telaah Sinergitas Fungsi Sosial Baitul Mal dan Fungsi Bisnis Baitul Tamwil Pada Kanindo Syariah “

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasi kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. rer. Pol. Wildan Syafitri, SE., ME, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Nurul Badriyah, SE.,ME selaku, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr.Dra.Asfi Manzilati,ME. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan waktu, petunjuk, dan bimbingan sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi atas ilmu dan nasehatnya yang telah diberikan kepada peneliti selama perkuliahan, semoga dapat bermanfaat di masa depan.
5. Seluruh Keluarga Besar KAHMI DAN HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bantuan berupa fasilitas dan informasi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini

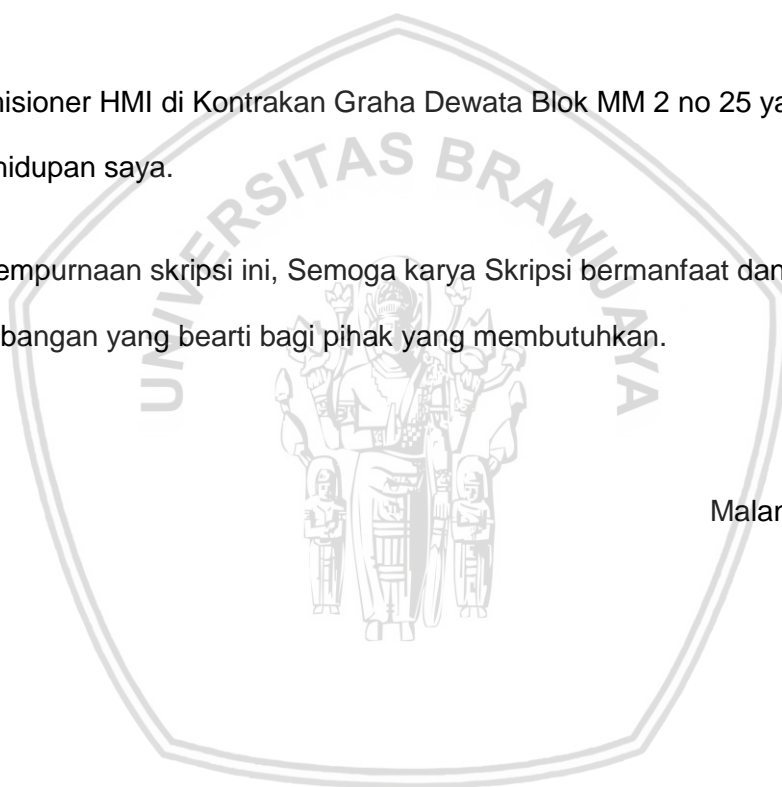
6. Abi,Umi, dan Kakak-adik saya, tidak lupa juga seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.

7. Saudari Rizki Widi Ibrahim (Cici) yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi saya.

8. Sahabat Demisioner HMI di Kontrakan Graha Dewata Blok MM 2 no 25 yang sudah mewarnai kehidupan saya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, Semoga karya Skripsi bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang bearti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 13 Juli 2018



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan Syariah

Sesuai dengan sistem keuangan yang ada di Indonesia, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Menurut SK Menkeu RI No. 792, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat adalah “badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non finansial atau aset riil. Dengan demikian, lembaga keuangan adalah setia perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan (Soemitra, 2010).

Maretha Syahbania mengatakan Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset aset keuangan (*financial asset*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah (Ethasyahbania, 2010). Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik secara tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Soemitra, 2010).

Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. *Universal*, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Lembaga keuangan syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Adapun ciri-ciri lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediary institution*, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh*/ kredit) guna transaksi sosial.

5. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

2.1.1. Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Sistem keuangan di Indonesia di jalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

2.1.1.1 Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank secara operasional di bina dan di awasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri dari (Soemitra, 2010: 45):

a. Bank Umum Syariah

Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan No. 10 Tahun 1998 bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah belakangan disahkan pula UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Juni 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional di mana Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sempit dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

2.1.1.2 Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan nonbank lebih banyak jenisnya dari lembaga keuanganbank. Masing-masing lembaga keuangan nonbank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan nonbank secara operasional di bina dan di awasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan nonbank dengan prinsip syariah antara lain (Sudarsono, 2004):

1. *Baitul maal wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Pondok Pesantren Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*tijarah*), sewa (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*).
2. Asuransi Syariah (*takaful*) menggantikan prinsip bunga dengan prinsip dana kebajikan (*tabarru'*), dimana sesama umat dituntun untuk saling tolong-menolong ketika saudara mengalami musibah.
3. Reksadana Syariah. Reksadana syariah mengganti sistem deviden dengan bagi hasil *mudharabah* dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai portofolionya.
4. Pasar Modal Syariah, sebagaimana reksadana syariah, pasar modal syariah juga menggunakan prinsip yang sama.
5. Pegadaian Syariah (*rahn*). Pegadaian syariah menggunakan sistem jasa administrasi dan bagi hasil untuk menggantikan sistem bunga.
6. Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf. Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal. Dana ini hanya boleh di alokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukan yang

telah digariskan menurut syariah Islam (misalnya alokasi zakat maal dan zakat fitrah telah di tentukan oleh Al-qur'an).

2.2. Perkembangan *Baitul maal wa Tamwil*

2.2.1. Perkembangan *Baitul maal wa Tamwil* di Indonesia

Upaya merintis pendirian BMT di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1990-an. Berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muallalat Indonesia (BMI). Pada saat itu operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Badan Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Seperti lembaga-lembaga ekonomi lainnya, kedudukan dan status BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki badan hukum. Tiga landasan pokok pendirian BMT yakni filosofis, sosiologis dan yuridis menjadi patokan dasar utama kenapa BMT dianggap sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum. Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan kepada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi islam (*fiqh al-muamalah*) dalam praktik.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam sejenis tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, azas-azas muamalah seperti kekeluargaan, gotong-royong, mengambil manfaat, dan menjauhi mudharat serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia (Sadrah, 2004). Secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan kepada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi

belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. pada akhirnya, ide pembentukan BMT semakin mencuat ke permukaan di awal tahun 1990-an (Sadrah, 2004).

Adapun secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 dan PP No. 72/1992 tentang perbankan. Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, maka terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia (Sadrah, 2004).

Pengembangan BMT merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995, PINBUK yang didirikan memiliki fungsi (Soemitra, 2010):

1. Mensupervisi dan membina teknis, administrasi, pembukuan, dan finansial BMT-BMT yang terbentuk.
2. Mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan inkubasi bisnis pengusaha baru dan penyuburan pengusaha yang ada.
3. Mengembangkan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkat nilai tambahnya.
4. Memberikan penyuluhan dan latihan.
5. Melakukan promosi, pemasaran hasil dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil.

6. Memfasilitasi alat-alat yang tidak mampu dimiliki oleh pengusaha secara perorangan, seperti faks alat-alat promosi dan alat-alat pendukung lainnya.

2.2.2. Pengertian *Baitul maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul maal dan *Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul maal* dan *Baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Sudarsono, 2004).

Baitul maal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal waal-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Soemitra, 2010).

Baitul maal wa Tamwil juga merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Berdirinya BMT dilatar belakangi karena adanya tuntutan masyarakat bagi adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dan tujuan dari didirikannya BMT adalah menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat yang terhindar dari praktek-praktek usaha yang berbau riba (Sadrah, 2004).

BMT (*Baitul maal wa Tamwil*) menurut Soemitra (2009) adalah “Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh

kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin”.

Baitul maal wa Tamwil mempunyai visi dan misi dalam operasionalnya. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT (Soemitra, 2010).

Berdirinya BMT dilatarbelakangi karena adanya tuntutan masyarakat bagi adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dan tujuan dari didirikannya BMT adalah menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat yang terhindar dari praktek-praktek usaha yang berbau riba (Sadrah, 2004).

2.2.3. Karakteristik *Baitul maal wa Tamwil* (BMT)

Pengembangan infrastruktur ekonomi islam salah satunya dapat dilakukan melalui BMT. Sebagai instrument lembaga keuangan syariah, BMT mempunyai karakteristik sebagai berikut (Soemitra, 2010):

1. *Business Oriented*, yaitu bertujuan untuk mencari laba dan keuntungan bersama dikalangan anggotanya dari berbagai kegiatan usaha yang dikelola.

2. *Social Benefit*, yaitu dapat menyelenggarakan pengelolaan dana infaq, zakat dan shadaqah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
3. *People Economic System*, yaitu menjadi lembaga keuangan syariah yang bergantung kepada peran serta masyarakat di dalamnya.
4. *Accountable Economic System*, yaitu menjadi lembaga keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.2.4. Fungsi *Baitul maal wa Tamwil* (BMT)

Adapun fungsi *Baitul maal* Wat Tamwil (BMT) adalah sebagai berikut (Huda, 2010):

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajibansuatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Selain fungsi umum, BMT juga mempunyai fungsi di masyarakat, yaitu (Huda, 2010):

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

2.2.5. Peranan *Baitul maal wa Tamwil* (BMT)

Adapun peranan BMT adalah sebagai berikut (Huda, 2004):

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non-Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting ekonomi islami.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka, BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu sedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang rata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikankelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis jenis pembiayaan yang dilakukan

2.2.6. Prinsip-prinsip Utama *Baitul maal wa Tamwil* (BMT)

Sebagai lembaga keuangan Islam, tentu saja BMT mempunyai prinsip-prinsip utama dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip-prinsip utama BMT yaitu (Soemitra, 2010):

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan (*kooperatif*)
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. Profesionalisme
7. Istikamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

2.2.7. Akad, Produk Dana dan Jenis Usaha Pembiayaan *Baitul maal wa Tamwil* (BMT)

Dalam menjalankan usahanya, ada berbagai akad yang ada dalam BMT dan akad tersebut mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil (Huda, 2010). Produk penghimpunan dana lembaga keuangan islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

1. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Walaupun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
2. Tabungan Mudarabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan lembaga keuangan islam bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
3. Deposito *Mudarabah*, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudarabah mutaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah sebagai *shahibul mal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudarabah muqayyadah*.

Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah dan bawah. Diantara usaha pembiayaan tersebut adalah:

1. Pembiayaan *Mudharabah*.
2. Pembiayaan *Musyarakah*.
3. Pembiayaan *Murabahah*.
4. Pembiayaan *Bay' bi Saman Ajil*.
5. *Al-Qardhul Hasan*.

Usaha-usaha diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain kegiatan-kegiatan keuangan tersebut, BMT juga mengembangkan usaha dibidang sektor ril, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek (Soemitra, 2010).

Dengan demikian sebagaimana namanya BMT menjalankan dua perihal yakni perihal sosial (*tabarru'*) dan perihal bisnis atau profit. Karenanya perihal tersebut merupakan aspek yang dapat merealisasikan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen-instrumen di dalam fungsi sosial dan fungsi bisnis tersebut. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat

2.3. Produk-produk *Baitul maal wa Tamwil*

Produk-produk yang ada di BMT juga memiliki banyak variasi seperti halnya yang ada pada perbankan syariah. Pada dasarnya produk yang dipasarkan memiliki persamaan namun yang membedakan adalah dalam hal pengelolaannya. Setiap lembaga memiliki cara tersendiri dalam mengelola produk agar produk tersebut diminati oleh nasabahnya. Produk yang ada di lembaga keuangan pada dasarnya yaitu produk tabungan dan produk pembiayaan. Pembahasan mengenai produk tabungan dan juga produk pembiayaan tersebut akan dibahas secara mendetail pada pembahasan di bawah ini:

2.3.1. Produk Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan, yaitu: "Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: "Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*."

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul mal*. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

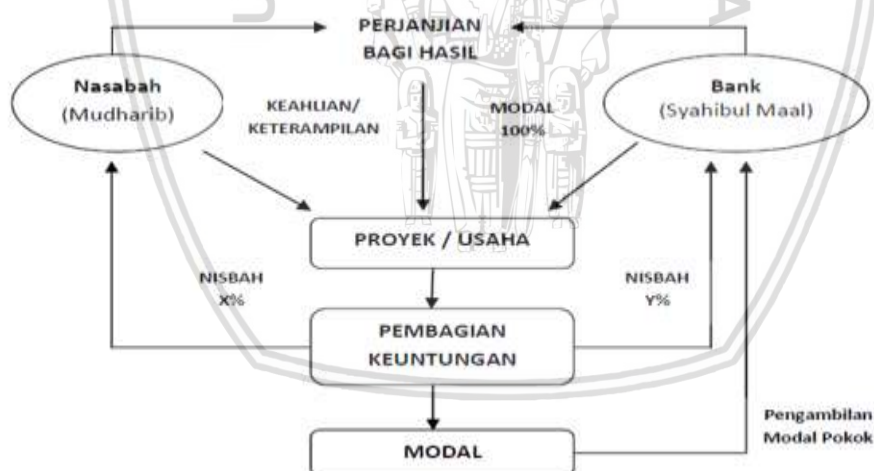
Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya (Bank Indonesia, 2016).

2.3.1.1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* (ضرب), yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian

tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2011). Berdasarkan berbagai hal tersebut, maka skema tentang pembiayaan mudharabah adalah, sebagai berikut :

Gambar 2.1. Skema *Mudharabah*



Sumber: (Antonio, 2001)

Berdasarkan skema di atas, pihak bank melakukan kontrak kerjasama *mudharabah* dengan nasabah dimana pihak bank menjadi *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai *mudharib* yang memiliki keahlian di bidang usaha tertentu. Hasil dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan *mudharib* kemudian akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah

disepakati. Namun jika usaha mengalami kerugian, maka *shahibul maal* atau bank akan menanggung seluruh kerugiannya selama kerugian disebabkan oleh resiko bisnis. Jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian *mudharib*, maka nasabah/*mudharib* lah yang akan menanggung seluruh kerugian yang dialami. Selanjutnya pokok modal usaha *mudharabah* akan dikembalikan ketika kontrak berakhir dan dibayarkan langsung dan tidak boleh dilakukan secara cicilan atau angsuran karena sifatnya adalah pembiayaan modal kerja.

2.3.1.1.1 Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* adalah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-quran dan hadits berikut ini (Ilmi, 2002):

a) Al-Qur'an

Dalam Firman Allah, surat al-Muzammil: 20

.....أَخْرَجُوا مِصْرًا مِّنْ مِّصْرٍ.....

“.....Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....” dan Surat Al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

b) Al-Hadits

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلنَّيْعِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

"Diriwayatkan oleh Sholeh Bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan, adalah jual beli secara tangguh,

muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (dimakan), bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)"

2.3.1.1.2 Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *mudharabah*, yaitu (1) pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, (2) pembeli (*mushtari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang, (3) barang dagangan atau objek (*mabi'*), (4) harga (*thaman*), dan (5) ijab qabul (*shigah*) (Wiroso, 2005).

Meskipun rukun telah terpenuhi tetapi jika syarat tidak terpenuhi maka akad dinyatakan tidak sah. Adapun syarat-syarat yang diharuskan dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut:

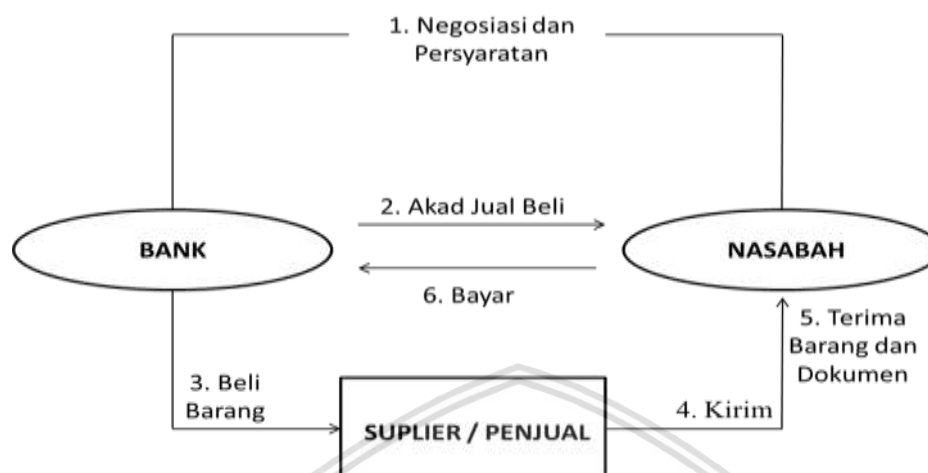
1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana pemilik modal (*shahib almal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja) Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ija-qabul*) Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
4. *Nisbah* keuntungan, pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemilik modal dan penerima pinjaman.

2.3.1.2. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan *mark-up* atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan bersama. Berikut adalah skema pembiayaan *murabahah*.

Gambar 2.2. Skema *Murabahah*.



Sumber: (Antonio, 2001)

Akad *murabahah* biasanya berkaitan dengan pembiayaan jual beli yang bersifat konsumtif, modal kerja, dan investasi, misalnya pembiayaan untuk kredit perumahan, pembiayaan untuk pembelian motor, pembelian tanah, mobil, komputer, dan lain sebagainya. Pembiayaan ini bisa dibayarkan dengan cara tangguh atau angsuran. Keuntungan yang disepakati kedua belah pihak tersebut selanjutnya lebih dikenal sebagai margin *murabahah*, yaitu tambahan yang ditetapkan diawal yang persentasenya sama pertahun dan tidak boleh dilakukan perubahan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, kewajiban yang harus dipenuhi nasabah terhadap akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukannya adalah membayar angsuran atau cicilan pokok atas utang *murabahah*nya ditambah dengan margin yang telah ditetapkan tersebut. Margin inilah yang menjadi keuntungan bagi bank. Sedangkan, menurut PSAK No.102, akuntansi *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan definisi diatas ada tiga karakteristik utama transaksi murabahah, yaitu (1) transaksi jual-beli, pihak yang terlibat adalah pembeli dan penjual dalam arti yang sesungguhnya, bukan sebatas perantara ataupun pihak yang memiliki keunggulan dalam pendanaan, (2) pengungkapan kos/harga perolehan/biaya perolehan barang dalam hal ini penjual berkewajiban mengungkapkan harga perolehan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli, (3) penetapan margin keuntungan, pembeli dan penjual bersepakat atas besarnya margin keuntungan/pendapatan yang diterima penjual.

2.3.1.2.1 Landasan Hukum Murabahah

Landasan penentuan hukum *murabahah* diambil dari alquran dan hadist sebagai berikut:

- 1) Al Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al Baqarah [2]: 275)

- 2) Hadits riwayat dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat al quran dan hadist di atas dapat dipahami bahwa transaksi jual beli sah jika tidak ada riba dan dilandasi suka sama suka. Konsep murabahah sendiri merupakan produk perkembangan yang dicetuskan oleh para ulama' mujtahid yang pastinya tidak melanggar hukum fiqih.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. (*Al Qowaid al-Fiqhiyyah*) tidak ada dalil nash yang menjelaskan secara spesifik tentang murabahah. Jadi, murabahah adalah

salah satu hasil perkembangan yang tentu tidak melanggar apapun. Dan juga merupakan salah satu contoh hasil dari kaidah yang disebutkan di atas.

2.3.1.2.2 Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu (1) pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, (2) pembeli (*mushtari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang, (3) barang dagangan atau objek (*mabi'*), (4) harga (*thaman*), dan (5) ijab qabul (*shigah*) (Wiroso, 2005).

Meskipun rukun telah terpenuhi tetapi jika syarat tidak terpenuhi maka akad dinyatakan tidak sah. Adapun syarat-syarat yang diharuskan dalam murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, suka rela, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa/di bawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjual belikan tidak termasuk yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh dari pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan diterima pembeli.
- 3) Akad dalam pembiayaan murabahah harus jelas dan menyebutkan secara spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, serah terima harus selaras baik dalam spesifikasi barang dan maupun harga yang disepakati. Sedangkan syarat umum dalam melakukan *Bai'* (penjual murabahah) yaitu
 - (1) penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah,
 - (2) kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
 - (3) kontrak harus bebas dari riba, dan
 - (4) penjual harus menjelaskan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan diangsur (Antonio, 2001).

2.3.2. Produk Pembiayaan *Baitul maal wa Tamwil*

Pada produk pembiayaan terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Pertama, pembiayaan *mudharabah*. Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa “*Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Kedua, pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

2.4. Fungsi Bisnis *Baitul maal wa Tamwil*

2.4.1. Produksi

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau masukan yang juga disebut faktor-faktor produksi menjadi keluaran (output) sehingga nilai barang tersebut bertambah. Beberapa faktor produksi atau input yang digunakan akan menghasilkan output (keluaran). Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat (dan kombinasi) penggunaan input dan tingkat output per satuan waktu. Fungsi produksi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk dengan input yang digunakan dalam proses produksi.

Keuntungan (laba) merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilaksanakan efisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Keuntungan diartikan selisih antara total pendapatan dengan total biaya, yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi (Bangun, 2007). Keuntungan inilah yang mengarahkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Kelayakan dalam Penetapan Laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, “Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambah jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.

1. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakar akuntansi Islam di atas menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik

monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.

2. Masa Perputaran Modal. Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputaran dan bertambahnya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.
3. Cara Menutupi Harga Penjualan. Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.
4. Unsur-unsur Pendukung. Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang *marketable* maupun yang *non marketable*, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

2.4.2. Pendapatan

Menurut Sumitro (1990) pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik

berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan jasa manusia. Pendapatan juga merupakan hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi dan besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu (Ridwan,2004):

1. Pendapatan permanen (*permanent income*) adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji atau upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan).
2. Pendapatan sementara (*transitory income*) adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan.

Menurut Winardi (2004), pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu masyarakat, dan juga pendapatan yang digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi individu yang melakukan pinjaman untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan cara melakukan usaha tambahan agar dapat membantu menambah pendapatannya. Berbagai cara dilakukan masyarakat mulai dari investasi sederhana sampai dengan investasi bermodal besar yang berdampak pada sektor moneter dalam pinjaman modal usaha dan investasi yang semakin tinggi. Dengan demikian, adanya hal tersebut pada akhirnya akan mengarah kepada pilihan individu untuk melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang semakin meningkat.

2.5. Fungsi Sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aktifitas ekonomi tidak semata-mata hanya mencari keuntungan tetapi juga ada hubungan sosial yang dijalankan bersama dengan aktifitas ekonomi

tersebut. Hal tersebut juga berlaku di lembaga keuangan syariah dimana pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Oleh karena itu fungsi lembaga keuangan syariah perlu di kaji lebih lanjut bagaimana fungsi sebenarnya yang dijalankan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Pada bagian ini akan mengulas tentang sudut pandang bagaimana fungsi sosial di lembaga keuangan syariah

dilaksanakan. Fungsi sosial lembaga keuangan syariah berasal dari prinsip-prinsip inti ajaran dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Oleh karena itu maka fungsi sosial merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada aktifitas lembaga keuangan syariah. Apa yang menjadi dasar dari pelaksanaan fungsi sosial tersebut dapat kita kaji selanjutnya.

2.5.1. Dasar Fungsi Sosial di Lembaga Keuangan Syariah

Secara mendasar inti dari fungsi sosial dalam Lembaga Keuangan syariah adalah berasal dari prinsip-prinsip inti ajaran dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Farook (2008), menyampaikan bahwa tiga prinsip dasar utama dalam lembaga keuangan islam adalah bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, adanya pertanggungjawaban kepada Sang Ilahi dan kewajiban dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan serta mencegah segala hal yang bersifat kemungkaran. Dari tiga hal dasar tersebut yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas fungsi sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat kita lihat dalam Ayat Al-Quran sebagaimana tersebut dibawah ini:

1) Pertama, Prinsip kekhalifahan menunjukkan bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi dan atas seijin karena Allah, manusia telah dipercaya untuk mengelola kepemilikan Allah yang ada. Allah menyatakan prinsip ini dalam Al Quran surat Al-Baqarah Ayat 30 yaitu :

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat,"Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata," Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "sesungguhnya Aku mengetahui, apa yang tidak kamu ketahui".

Allah lebih lanjut menyatakan dalam surat Al-An'am Ayat 165 yaitu:

"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu diatas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia maha Pengampun dan Maha Penyayang".

2) Kedua, Prinsip setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban kepada Ilahi mengalir dari prinsip kekhalifahan dan menunjukkan bahwa individu akan bertanggung jawab kepada Allah untuk semua tindakan mereka pada hari kiamat. Prinsip ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dua di antaranya adalah Surat An-Nisa Ayat 86 yaitu: "Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu". Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surah Al Zalzalah 7-8: "Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat *zarrah*, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya".

Beberapa hal diatas adalah bagian dari pertanggungjawaban Ilahi dan menjadi dasar bagi semua tindakan yang kaum Muslim, dan berdampak pada setiap perilaku organisasi yang dilaksanakan oleh ummat islam dimana perilaku individu akan berdampak pada perilaku organisasi. Dengan kesadaran kaum muslim bahwa setiap tindakannya akan dimintai tanggungjawab, maka setiap

muslim akan berhati-hati dalam menggunakan setiap waktu, kesempatan, harta, kekuasaan yang dimiliki tidak lain untuk beribadah dan mengharap apa yang dilaksanakan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dengan semangat ini maka seharusnya perilaku muslim yang taat akan berdampak pada perilaku organisasi yang islami pula sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap aktifitas organisasi secara benar.

3) Ketiga, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran merangkum tanggung jawab bahwa Allah menempatkan seorang muslim sebagai wakil dan khalifah. Allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 71 yaitu : "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana".

Dalam ayat lain, Allah berfirman dalam Surat Ali-Imran Ayat 110 yaitu : "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".

Dari dasar yang dikemukakan diatas maka ruang lingkup tanggungjawab dalam hal ini sangat banyak dan meliputi semua aspek dari kehidupan muslim. Namun mendefinisikan lingkup yang spesifik dari tanggung jawab dalam hukum islam adalah hal yang kompleks. Tanggungjawab ini bukanlah sesuatu yang secara spesifik diatur dalam hukum syariah seperti halnya pelarangan riba. Memang, sebagian besar tanggungjawab ini adalah tindakan bijaksana oleh

individu didasarkan pada seperangkat prinsip yang berasal dari Al Quran dan Hadist Nabi (Sunnah) (Kamali, 1989).

Dusuki dan Abdullah (2007) berpendapat suatu konsepsi Islam tentang fungsi sosial kelembagaan harus dilaksanakan, direalisasikan dan selalu berubah dalam setiap keadaan. Pada intinya, mereka berpendapat bahwa konsepsi fungsi sosial kelembagaan harus didefinisikan dalam batas-batas masalah. Masalah dasarnya memberikan manfaat dan menghindari bahaya, tetapi maknanya lebih luas sebagai sumber hukum berarti sesuatu yang membantu melestarikan tujuan syariat (Al-Raisuni, 1992. dalam Farook, 2008).

P3EI UII (2009) mengemukakan bahwa *mashlahah* adalah segala bentuk keadaan baik materiil maupun nonmateriil, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam Al-Quran masalah banyak disebut dengan istilah manfaat atau *manafi* yang berarti kebaikan yang terkait materiil, fisik, psikologis hal hal indrawi lainnya (QS 6:76, 14:5, 17:28, 18:21, 27:55). Masalah sering diungkap dengan istilah lain seperti hikmah, huda, barakah yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat (QS 2:269, 24:41). Jadi masalah mengandung pengertian kemanfaatan duniawi dan kemanfaatan akhirat. Menurut As-shatibi dalam P3EI UII (2009) *masalah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nash*) dan material (*wealth*).

2.5.2. Kategori Fungsi Sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang utama (*fadhu*) lebih dahulu sebelum melaksanakan yang tambahan (sunnah). Hal ini didasarkan pada teori ke tuhanan sebagaimana ditetapkan Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 286 yakni:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa Allah SWT memerintahkan kita melakukan (Shalat , Zakat dan Haji dll), Allah memerintahkan untuk umat muslim untuk melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan hidayah dan perbaikan bagi diri kita. Oleh karena itu, secara eksplisit bahwa aturan yang utama adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak memberatkan bagi yang melaksanakan. Hal tersebut masih dalam kapasitas dan kekuatan dari pelaksana untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Sebagaimana contoh ibadah Haji, ibadah ini merupakan salah satu rukun Islam, dimana bagi yang belum mampu melaksanakannya maka dia tidak wajib melaksanakannya. Tetapi manakala dia sudah sanggup untuk melaksanakannya maka hukumnya menjadi wajib. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa ada katagorisasi dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah SWT dilihat dari kemampuan individu dan Allah tidak akan memberi masalah kecuali atas kemampuan individu tersebut.

Gagasan fungsi sosial untuk lembaga keuangan Syariah harus dirancang untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al Quran dan Hadist. Oleh karena itu maka lembaga keuangan syariah harus memenuhi pedoman wajib seperti halnya tugas utama (Fardhu) yang secara dasar untuk keberadaan mereka sebagai lembaga keuangan islam. sementara itu direkomendasikan bahwa mereka melakukan kegiatan sukarela jika berada dalam kapasitas mereka. Al-Shatibi dalam Dusuki dan Abdullah (2007) pada dasarnya mengklasifikasikan masalah menjadi tiga yaitu:

1. Daruriyat (yang penting);
2. Hajiyat (yang komplementer);
3. Tahsiniyat (yang pelengkap).

Karena kita memanfaatkan *masalah* sebagai dasar hukum tanggung jawab sosial dalam tujuan syariat, karena itu bahwa kategorisasi masalah juga harus digunakan sebagai dasar untuk kerangka kerja terstruktur dalam perspektif fungsi sosial. Penjelasan dari tiga tingkatan tersebut adalah berikut ini:

1) *Daruriyat* (yang penting) adalah kepentingan yang mendasar dari kebutuhan setiap orang seperti iman, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Menurut Mohammad Hashim Kamali, kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu kebutuhan diatas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

2) *Hajiyat* atau kebutuhan pelengkap dimana melengkapi kebutuhan penting dan merujuk kepada orang yang berkepentingan, jika diabaikan akan mengakibatkan kesulitan tetapi tidak memberikan gangguan pada aktifitas kehidupan. Dengan kata lain, mereka dibutuhkan untuk mengurangi kesusahan sehingga dapat hidup bebas dari kesusahan dan kesulitan. Misalnya dapat dilihat dalam lingkup transaksi ekonomi, di mana syariah mengizinkan kontrak seperti membeli di awal (salam) dan sewa (ijarah), karena orang membutuhkannya meskipun ada pendapat yang sementara bertentangan dengan aturan syariah pada keberadaan aset dan kepemilikan, yang ditoleransi oleh para ahli untuk mengurangi kesulitan bagi individu.

3) *Tahsiniyat* atau hiasan didefinisikan sebagai kepentingan-kepentingan yang jika disadari akan mengarah pada kesempurnaan dalam kebiasaan dan perilaku orang di semua tingkat pencapaian (Dusuki dan Abdullah 2007). Ini pada dasarnya adalah kesempurnaan tujuan syariat yaitu untuk mendapatkan tingkat keadilan, sikap dan perilaku, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam masyarakat atau terhina.

Klasifikasi ketiga tahap ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk menciptakan struktur yang cocok untuk memperkenalkan tingkat aspirasi tanggung jawab sosial institusional bagi lembaga keuangan islam. Hal Ini berpotensi dapat memainkan peran penting dalam menyediakan suatu mekanisme yang dapat bersaing dengan lembaga satu sama lain sebagai simbol keislaman yang sebenarnya ada dalam lembaga keuangan.

2.5.3. Bentuk-bentuk Fungsi Sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah

Diungkapkan bahwa pilihan nasabah sebagai pelanggan yang setia dari sebuah bank islam dikarenakan beberapa faktor diantaranya seperti yang dikemukakan Dusuki dan Abdullah (2007) yang meneliti nasabah bank Islam di Malaysia. Dikemukakan bahwa bank syariah menjadi pilihan yang dominan karena dasar islam dan kualitas keuangan dan pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah, selain itu faktor yang dianggap penting adalah praktek-praktek fungsi sosial yang baik serta kenyamanan dan produk yang layak.

Bentuk kewajiban fungsi sosial mengacu pada perilaku bahwa lembaga keuangan islam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan yang melayani kewajiban kolektif agama. Apabila fungsi sosial tidak dilakukan berarti bahwa lembaga keuangan islam tersebut tidak mematuhi petunjuk dasar Al-Quran dan aturan yang ketat dari syariat. Bentuk fungsi sosial ini tidak membutuhkan pengeluaran yang signifikan dari sumber daya dan berada dalam jangkauan semua lembaga keuangan Islam terlepas dari asal negara mereka, bentuk hukum atau ukuran. Hal ini karena bentuk wajib fungsi sosial dapat dilakukan seperti contohnya menghindari seperti riba, hal tersebut mewujudkan fungsi sosial yang sesuai dengan kaidah syariah yang dilaksanakan.

2.5.4. Prinsip Berinvestasi dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dan umat Islam tidak dapat menginvestasikan uang mereka dalam perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang tidak

diizinkan dalam hukum Islam, misalnya: peternakan babi, pabrik yang memproduksi alcohol, industri tembakau. Selain itu, tidak bisa berinvestasi dalam kegiatan yang berbasis utang atau bunga. Penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mematuhi dan membuat kebijakn yang jelas sesuai dengan hukum islam. Mengutip pernyataan Wilson (1997) bahwa investasi yang dilaksanakan investor islam sangat mempertimbangkan criteria halal dan haram sebagai ciri khas investasi. Unsur *gharar* atau penipuan sebagai sebuah langkah illegal berdasarkan hukum islam dilarang keras, oleh karena itu transparansi dalam proses berinvestasi secara islam menjadi sangat penting.

2.5.4.1 Zakat

Membayar zakat merupakan kewajiban wajib pada bagian dari semua umat Islam untuk mensucikan kekayaan mereka, terlepas dari kondisi yang ada. Standart yang biasanya diberlakukan di lembaga keuangan islam adalah mengenai kebijakan pengumpulan dan pembayaran zakat. Namun ada juga perbedaan dimana apakah bisnis Islam diwajibkan untuk membayarpajak atau apakah itu hanya wajib bagi hanya individu (Shihaddeh 1987, dalam Farook 2008).

Untuk batas itu, beberapa lembaga keuangan Islam tidak perlu untuk menetapkan kebijakan Zakat, kecuali bersifat suka rela dan dalam ruang lingkup lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, perlu diatur apakah pembayaran zakat dilaksanakan melalui pemerintah atau secara sukarela.

2.5.4.2 Qardhul Hasan

Qardhul Hasan salah satu jenis pinjaman yang diakui dalam Islam. Allah merujuk kedalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 245 yaitu :

"Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak.

Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Salah satu pelaksanaan dari Qardhul Hasan adalah pinjaman yang diberikan kepada fakir miskin untuk periode tertentu tanpa adanya kelebihan pembayaran pinjaman pokok. Penerimaannya diperlukan untuk membayar kembali pokok pinjaman. Sebagai media intermediasi keuangan, lembaga keuangan islam berada dalam posisi khusus dalam masyarakat untuk mendorong kegiatan Qardhul Hasan dalam operasionalnya dengan nasabah. Hal ini karena lembaga keuangan islam dapat langsung dana dari deposan dan pelanggan dan juga mengalokasikan dana tersebut kedalam tujuan yang dibutuhkan. Tidak ada organisasi social lain memiliki kesempatan untuk menawarkan keahliannya dalam intermediasi yang seperti halnya lembaga keuangan islam dapat dilaksanakan.

Lembaga keuangan Islam dapat membuka rekening khusus Qardul Hasan dimana dapat menerima deposito yang kemudian akan digunakan untuk kebutuhan siswa tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan akibat dari kekurangan pembayaran, biaya pengobatan orang sakit dan kebutuhan yang memang sangat mendesak yang layak untuk dibantu.

Lembaga keuangan Islam dapat menjalankan dana khusus penggalangan kampanye untuk meningkatkan pendanaan Qardhul Hasan melalui infrastruktur yang ada dari lembaga keuangan Islam.

Arifin dan Adnan (2012), mengemukakan bahwa manager dari bank Islam menyepakati bahwa untuk meningkatkan fungsi sosial perusahaan maka perbankan islam harus menyediakan pembiayaan Qardhul Hasan dalam rangka membantu orang yang membutuhkan. Perbankan harus mendivertifikasi produknya khususnya qordul hasan dengan pedoman dan kebijakan pembiayaan yang tepat. Adnan dan Furfurdana (2006)

menyatakan bahwa model pinjaman qordul hasan menggunakan analisis Character, collateral (yang digunakan referensi), payment yang sangat sederhana dalam penyaluran pinjamannya. Ketepatan dan keakuratan dalam menganalisis tersebut mempengaruhi kualitas pinjaman. Selain itu dalam pinjaman Qardhul Hasan, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah pola pelatihan dan pendampingan untuk mengubah pola kehidupan penerima Qardhul Hasan, dalam penggunaan pinjaman sangatlah penting disamping modal yang diberikan.

2.6. Penelitian Terdahulu

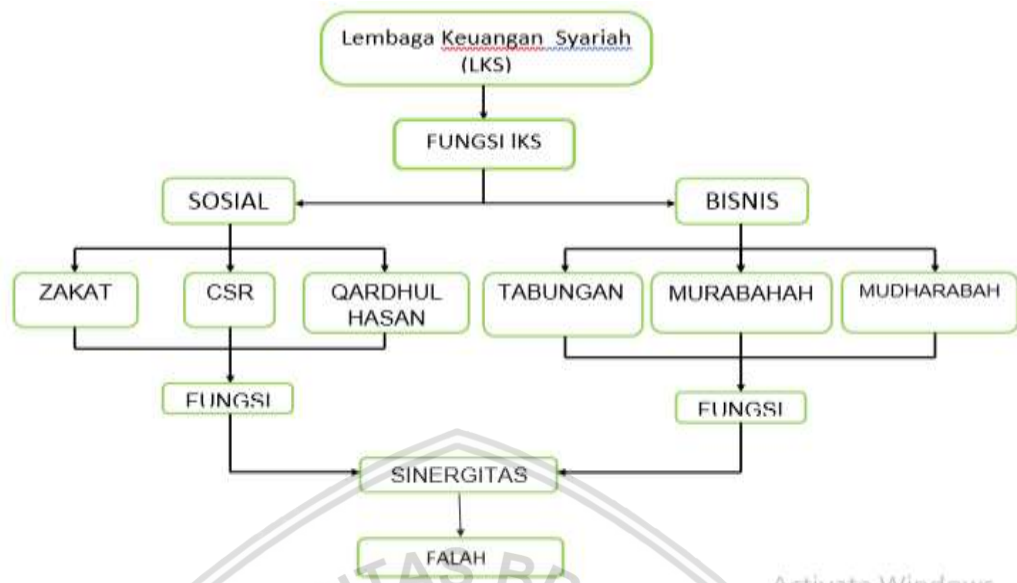
Ajar Alit Sambudi (2010), "Perbandingan Kinerja Keuangan *Baitul maal* Wat Tamwil (BMT) di Sukoharjo, Karanganyar, dan Solo Rasio dari PINBUK". Penilaian kinerja keuangan yang didasarkan pada standar PINBUK menggambarkan BMT di wilayah Sukoharjo, Karanganyar, dan Solo jika dilihat dari rata-rata menunjukkan struktur permodalan yang sangat sehat, likuiditas yang kurang, efisiensi yang sangat tinggi, rentabilitas yang tinggi. Kesejahteraan dapat dicapai apabila kebutuhan (needs), dapat terpenuhi. Maslow dalam Herien (2015) menggambarkan rumusan tentang kebutuhan yang hierarkis dalam bentuk segitiga, dimana kebutuhan yang ada di atas akan terpenuhi setelah kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Tingkatan paling bawah dalam hierarkis kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik yang menyangkut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian berturut-turut adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan atas diri. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dapat dinilai sejahtera. Karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.

Yusuf Nur Arifin (2014) “Peran *Baitul maal* Wat Tamwil Tumang Dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali 2014”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbedaannya adalah dimana penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran BMT dalam pembinaan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian penulis berfokus pada menganalisis peranan BMT dalam dalam pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rifqi Arief Aminullah (2009) “Peranan *Baitul* Mal Wat Tamwil Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada *Baitul* Mal Wattamwil (BMT) Darrusalam Ciamis Jawa Barat 2009)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama berfokus pada ingin mengetahui bagaimana peran BMT dalam mensejahterakan anggotanya Perbedaannya adalah dimana penelitian ini berfokus pada kesejahteraan disemua bidang termasuk didalamnya adalah pendidikan, kesehatan, dan ibadah. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada mensejahterakan melalui bidang kewirausahaan

Fadhillah (2013) “Peran BMT dalam pemberdayaan masyarakat talun,Pekalongan”, dimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dengan peneliti penulis ialah sama-sama membahas tentang pengembangan kesejahteraan masyarakat penelitian ini berfokus pada bagaimana perjuangan BMT Muhammadiyah ini berkembang untuk mensejahterakan masyarakat yang notabene pengikut Nahdatul Ulama dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana peranan BMT dalam menyejahterakan masyarakat melalui jiwa kewirausahaan.

2.7. Kerangka Pikir



Sumber: Peneliti

Activate Windows

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), metode kualitatif adalah metode penelitian yang hasil penelitiannya berupa data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Selain itu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan lebih bersifat deskriptif yang berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka-angka. Kemudian pola pendekatan yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan satu gambaran tentang fenomena-fenomena yang terdapat di sekitar fokus permasalahan dengan diikuti analisa-analisa yang bertujuan untuk memperoleh interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan dari fenomena yang terjadi. Alasan menggunakan jenis penelitian ini, karena sesuai dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Data deskriptif kualitatif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Landasan teori dalam penelitian ini adalah fenomenologis. Pendekatan fenomenologis dipilih untuk memahami arti dari suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada di dalamnya secara lebih dalam. Dalam penggunaan pendekatan ini tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti. Sehingga yang ditekankan oleh pendekatan ini adalah aspek subjektivitas dari informan itu sendiri (Moleong, 2012).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Neuman (2003) dalam Nofarina (2014), menjelaskan bahwa data pada metode

kualitatif berbentuk tulisan, teks, frase atau deskripsi simbol yang merepresentasikan orang, aksi, dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu, di situasi tertentu data bisa dikategorikan sebagai data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini memakai dua jenis data yaitu primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu tempat yang menjadi tujuan dalam penelitian dan jenis dari data primer pada penelitian ini sebagai berikut: (a) Wawancara; (b) Sumber tertulis; dan (c) Foto/dokumentasi gambar.
- b. Data sekunder adalah data yang dipublikasikan, yang dikumpulkan dari penelitian terdahulu atau sumber yang relevan lainnya. Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari: dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian yang didapatkan di BMT Sidogiri kota Malang dan BMT Kanindo Syariah di Kabupaten Malang.

3.3. Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini ialah menjawab tujuan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mencari tingkat sinergisitas antara *Baitul Mal* dan *Baitul tamwil* pada BMT. Fungsi sosial dan fungsi bisnis yang harus bersinergi ketika dilaksanakan ditataran praksis menjadi hal utama dari penelitian ini, pihak pengelola BMT harus melaksanakan kebijakan dan kebijaksanaan yang menyelaraskan keduanya bukan sebaliknya timbang atau singkatnya hanya salah satu dari dua fungsi yang dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Dalam penelitian ini informan yang dianggap tahu tentang apa yang peneliti harapkan menurut Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa penentuan

unit informan dianggap telah sampai kepada taraf "*redudancy*" (datanya telah jenuh, dan apabila ditambah informan yang baru namun tidak memberikan informasi yang baru), artinya bahwa dengan menggunakan informan baru selanjutnya boleh dilakukan apabila tidak lagi diperoleh tambahan informasi yang berarti.

Dalam penelitian ini terdapat dua kategori informan yakni (a) Informan kunci, merupakan informan yang diharapkan mengetahui internal dan operasional lokasi BMT yang diteliti, informan kunci dalam penelitian ini merupakan pemimpin BMT atau Bagian Hubungan Masyarakat dan Operasional BMT serta; (b) Informan pendukung, merupakan informan yang diharapkan merasakan kinerja dalam fungsi sosial dan bisnis BMT dalam hal ini nasabah binaan atau praktisi yang menggeluti ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam keuangan syariah. Jumlah informan didasarkan atas kebutuhan dan kejenuhan informasi yang telah didapatkan dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data-data berupa data primer dan data sekunder. Dalam data primer diperoleh dari:

1. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, (Sugiyono, 2011:138-140). Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara tidak terstruktur dimana dalam pelaksanaannya menggunakan pedoman wawancara yang berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan untuk memperoleh informasi yang lebih banyak yang mendukung permasalahan dalam penelitian mengenai sinergitas dari kedua Fungsi yang ada di dalam BMT.

2. Observasi. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Sugiyono (2011:227) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipatif, observasi tidak terstruktur, dan observasi terstruktur atau tersamar. Dalam observasi tersebut peneliti hanya mendatangi lokasi dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. Mencatat fenomena yang diselidiki melalui penglihatan dan pendengaran. Data yang dikumpulkan dalam pengamatan ini untuk mengetahui secara langsung sejauh mana sinergitas fungsi sosial dan fungsi bisnis di dalam BMT.
3. Dokumentasi. Selain menggunakan data dari hasil wawancara dan observasi, data lain yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian kualitatif adalah data yang berasal dari catatan di lapangan. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencatat kejadian yang ada di lapangan dengan memanfaatkan data sekunder yang ada. Dokumen yang diperlukan untuk menunjang pemahaman dan penggalian data dalam penelitian ini berupa catatan resmi, arsip dan makalah.

3.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggunakan uraian-uraian untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi lapangan, dengan berbagai data yang tersedia. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan ke dalam sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini langkah-langkah dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul mempunyai proses sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya. Data tersebut masih berupa data mentah dan perlu dilakukan pemilihan untuk menemukan isu utama penelitian yang lebih fokus.

2. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2011:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting menyangkut sinergisitas dua fungsi dalam BMT dengan demikian data yang telah dirangkum akan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang menjadi rumusan masalah.

3. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2011:249) penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk diagram, kalimat ataupun

tabel. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan apa yang menjadi rumusan masalah dan disajikan berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas.

3.6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif penentuan informan dilakukan secara langsung dan jumlahnya sedikit. Maka dari itu, perlu dilakukan strategi agar validitas terjaga. Menurut Noermalita (2011), data dalam temuan dapat dikategorikan sebagai data yang valid ketika:

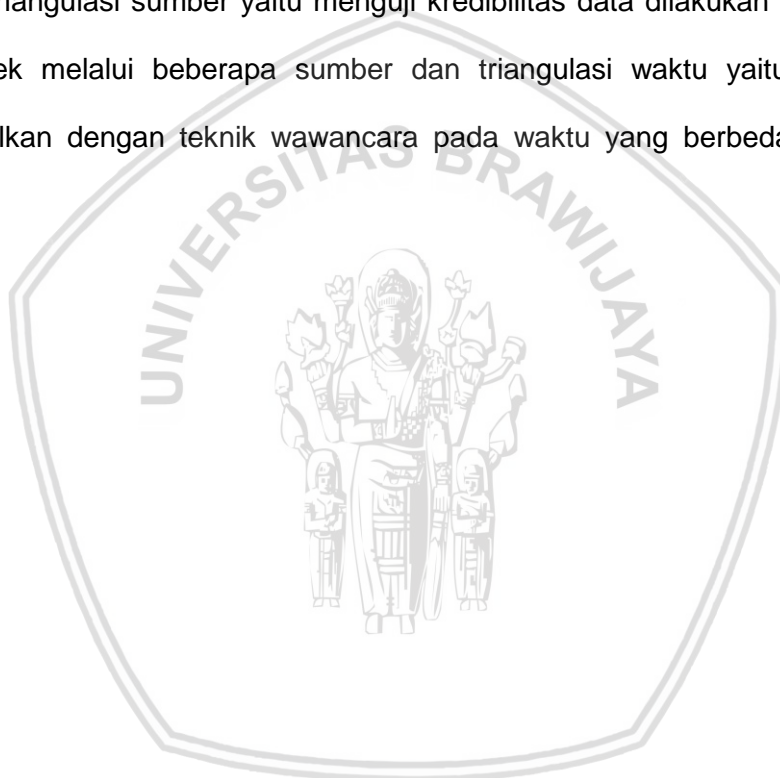
1. Menunjukkan nilai-nilai kebenaran;
2. Menyediakan kebenaran atau alasan di mana temuan dapat diterapkan;
3. Memungkinkan pertimbangan di luar yang berkaitan dengan konsistensi prosedur, *naturality* dari temuan dan keputusan.

Salah satu cara untuk mencapai validitas uji triangulasi. Berdasarkan Rostin dan Kimbal dalam Suman (2012), triangulasi adalah memeriksa kredibilitas data melalui kedua metode yaitu metode pengumpulan data dan sumber data. Kemudian Bungin (2003) memberikan contoh langkah-langkah triangulasi dengan:

1. Peneliti ini melakukan wawancara mendalam dan observasi untuk pengumpulan data;
2. Melakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan yang diperoleh untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dan observasi;

3. Konfirmasikan kembali semua materi yang telah diperoleh dengan informasi awal. Ini adalah tindakan pencegahan, karena mungkin ketika temuan tidak cocok dengan informasi sebelumnya.

Oleh karena itu, proses triangulasi dilakukan terus menerus dalam proses pengumpulan data, dan analisis data. Hal ini dilakukan sampai menegaskan kembali data ke informan tidak perlu lagi dan tidak ada perbedaan, kekurangan atau kesenjangan dalam temuan. Dalam penelitian ini triangulasi yang dipilih adalah triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek melalui beberapa sumber dan triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2011).



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Fungsi Bisnis

Kanindo Syariah Dau adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat. Seperti penyaluran dana dengan menggunakan murabah atau simpan pinjam. Dengan tujuan kegiatan tersebut, PT Kanindo Syariah Dau memiliki cara untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelumnya peneliti telah menanyakan tentang metode Kanindo Syariah dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak untung selaku Manajer atau pimpinan lembaga keuangan syariah ini:

“ ya strateginya adalah pertama kita selalu penguatan di SDM sumberdaya manusia karena dalam konteks lembaga keuangan mikro hubungan in personal antara anggota atau dalam bahasa lain nasabah itu harus merasa dekat dengan personil-personil tenaga kita atau SDM kita, makanya SDM kita harus selalu kita bekali dengan ilmu dan pengalaman serta motivasi yang cukup sehingga mereka bisa membangun dalam istilah kita itu anggota yang loyal atau customer yang royalty nah itu kalau bisa tercipta customer yang royalty itu kita tinggal maintenance mereka sehingga walaupun ada tawaran-tawaran dari pihak lain kalau sudah loyal dia tidak banyak berfikir untuk berpaling seperti itu”

Dalam lembaga keuangan mikro sifat utama yang perlu dimiliki adalah hubungan in personal antara pihak lembaga keuangan dengan nasabahnya. Ketika nasabah sudah merasa loyal kepada PT Kanindo Syariah Dau maka ketika ada tawaran dari pihak lain kepada nasabah, nasabah tidak banyak berfikir untuk berpindah. Maka dari itu dari pihak PT Kanindo Syariah Dau selalu memberi bekal pengalaman dan motivasi kepada SDM nya. Sebagai contoh, dalam konteks pembinaan pembiayaan SDM PT Kanindo Syariah Dau harus memantau nasabahnya sehingga jika kedepannya ada masalah dengan keterlambatan dalam pembayaran pihak PT Kanindo Syariah Dau dan nasabah mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Gambar 4.1
Pelayanan PT. Kanindo Syariah Melalui Pendekatan In Personal



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Ada beberapa produk yang menjadi produk utama di dalam Kanindo syariah dari segi *Baitul tamwilnya* yakni yang pertama adalah simpan pinjam. Kegiatan Usaha simpan pinjam Kanindo adalah menghimpun dana dan menyalurkannya melalui Jasa Keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota koperasi, koperasi dan atau anggotanya. Penghimpunan dana melalui produk-produk simpanan dan penyalurannya melalui pembiayaan dan piutang sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Untuk selaku informan sebagai berikut:

“Dalam operasionalnya karena dalam koperasi ini dulu istilahnya awal-awal koperasi serba usaha jadi banyak usaha yang kita kelola jadi serba usaha namanya tapi perjalanan kemudian dari sekian usaha itu ada yang eksis ada yang kemudian harus kita restrukturisasi jadi yang eksis bisa bertahan sampai sekarang adalah yang berbasis simpan pinjam dengan pola syari’ah.”

Pada awalnya Kanindo Syariah adalah sebuah lembaga keuangan berbentuk koperasi serba usaha. Produk awal yang dimiliki adalah simpan pinjam berbasis syariah, pembiayaan berbasis syariah, took, agro, dan budidaya produk pertanian. Namun produk yang tidak bisa berjalan dengan baik harus segera di likidasi. Salah satu produk yang masih berjalan dan menjadi produk utama Kanindo Syariah adalah simpan pinjam berbasis syariah.

Dalam proses simpan pinjam di Kanindo Syariah Dau terdapat proses yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Simpanan Akbar adalah simpanan Mudhorobah sistem bagi hasil, penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 2) Simpanan Amanah adalah simpanan wadiah penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Simpanan dapat berupa infaq, zakat, sodaqoh, simpanan tidak diberikan imbalan bagi hasil atas keuntungan usaha BMT.
- 3) Barokah Berjangka adalah simpanan Mudharabah berjangka (deposito) untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak boleh ditarik sebelum jangka waktu berakhir.

Produk yang menjadi keunggulan utama Kanindo Syariah Dau selain simpan pinjam berbasis syariah adalah pembiayaan berbasis syariah. Seperti yang dikatakan Pak Untung sebagai informan sebagai berikut:

“Jadi sekarang tinggal simpan pinjam dan pembiayaan dengan pola syaria’ah dan kaitannya dengan itu dia sebagai tanwil “

Pada proses sebelum pembiayaan diberikan, memerlukan adanya analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, and condition) dalam membuat rekomendasi. Analisis ini memberikan penjelasan dalam memperkirakan kondisi nasabah sebagai bahan pemberian rekomendasi sebelum pembiayaan diberikan. Pemberian pembiayaan memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak Kanindo Syariah Dau, dan meningkatkan kualitas karyawannya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjam untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para karyawan dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya. Terakhir, pada pemberian pembiayaan pada

Kanindo syariah Dau ini proses memastikan untuk mereview persyaratan 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*) tidak dilakukan secara periodik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2009) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif sikap terhadap risiko dan kualitas pembiayaan bagi hasil. Kualitas manajer dalam melakukan proses analisis pembiayaan dapat diukur secara nonkeuangan sebagai pengembangan karyawan karena pembiayaan merupakan faktor yang sangat berarti dalam mencapai kinerja perbankan secara keseluruhan.

Diantara Produk Pembiayaan Anggota dari Kanindo Syariah Dau yaitu :

1. Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari Kanindo Syariah Dau diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan *Mudhorobah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama. Akad pembiayaan *Mudhorobah* antara dua pihak, dimana Kanindo sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *Mudhorib* (Pengelola Usaha) dan atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bidang Yang Dilayani : - Pertanian; - Perdagangan; - Jasa; - Perikanan; - Industri; - Dll.

2. Pembiayaan Pengadaan/Jual Beli Barang Pembiayaan pengadaan/jual beli barang merupakan produk layanan di Kanindo Syariah diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan *Murobahah*. *Murobahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo.

3. Pembiayaan Kebajikan Pembiayaan kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari Kanindo syariah diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad *Qordul Hasan*.

4.2 Fungsi Sosial

Apabila terjadi keterlambatan dalam jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya, Kanindo Syariah Dau memiliki pendekatan sendiri untuk mengantisipasi. Seperti yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“ Pendekatan kita bukan pada punishmen ya walaupun ada punishmen dan itu juga diperbolehkan, tetapi yang kita utamakan adalah mendeteksi secara dini itu penting jadi kaya relay warning, jadi ita deteksi dini persoalan mereka jangan sampai kita kaget ketika mereka ada persoalan pembayaran angsuran dan sebagainya itu yang selalu kita tekankan kepada teman-teman untuk mengantisipasinya”

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa penanganan pembiayaan dan simpan pinjam bermasalah dilakukan dengan tiga langkah mengevaluasi keterlambatan dan gagal bayar sehingga langkah penyelesaiannya dapat tepat sasaran. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan terdiri atas:

1. Pembinaan dilakukan dengan pendekatan silaturahmi kepada anggota/nasabah yang mengalami kemacetan yang mana kemacetan tersebut memang tidak disengaja dan tidak kategori nasabah nakal sehingga bisa diberi

kelonggaran atau perpanjangan dan apabila diperlukan diajukan untuk pembiayaan *Al Qord* sehingga usaha tersebut bisa berjalan dan dapat menyelesaikan kewajibannya.

2. Perpanjangan/*Rescedul* Perpanjangan bisa dilakukan apabila langkah yang pertama sudah dilakukan dan dari hasil evaluasi nasabah tersebut memang masih layak dan usahanya masih berjalan karena ada sesuatu yang

menghambat usahanya sehingga diperlukan perpanjangan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya.

3. Penarikan jaminan/Eksekusi Penarikan jaminan dilakukan apabila nasabah tersebut memang sudah tidak bisa dibina dan masuk dalam kategori nasabah nakal. Hasil dari penjualan jaminan tersebut untuk penyelesaian kewajibannya dan apabila ada sisa penjualan diberikan kepada nasabah.

Dari hal ini proses bisnis Peningkatan mutu pelayanan KANINDO Syariah Dau selalu berupaya untuk meminimalisasikan seefisien mungkin, dilihat apa yang menjadi kebutuhan anggota itu Pengembangan inovasi produk dan jasa Syariah KANINDO Syariah Dau yang telah ada pada KANINDO syariah ingin di maksimalkan terlebih dahulu, seperti contohnya dalam kegiatan pembiayaan.

Persepsi fungsi sosial yang pertama adalah sebagai pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah. Pengelolaan Zakat Infaq dan sedekah berasal dari konsep *Baitul maal* yang dilaksanakan sebagai bentuk dari fungsi sosial. Lembaga keuangan mikro syariah pada masyarakat luas di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan *Baitul maal* wat Tamwil (BMT). Sesuai artinya BMT memang melaksanakan dua jenis kegiatan yakni *Baitul maal* dan *Baitul tamwil*. *Baitul maal* menerima titipan zakat, infaq dan sedekah dan waqaf. Serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Konsep *Baitul maal* merupakan bentuk fungsi sosial yang dipersepsikan oleh pelaku lembaga keuangan mikro syariah. *Baitul maal* merupakan tempat dimana menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada kelompok orang yang berhak menerima. Konsep *Baitul maal* di Indonesia biasanya banyak dikenal dengan istilah *Baitul maal* Wat Tamwil atau BMT. Pada jaman nabi pengelolaan maal atau zakat, infaq dan sedekah dikumpulkan dalam sebuah lembaga yaitu *Baitul maal*, seiring dengan berjalannya waktu maka pengelola

Baitul maal saat ini juga menjalankan fungsi tamwil atau fungsi bisnis. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Untung (Ketua Koperasi Kanindo Syariah Dau) sebagai berikut :

“Jadi konsepnya namanya juga BMT, *Baitul maal* wat tamwil, ada fungsi maal ada fungsi tamwilnya, makanya bagus di koperasi syariah itu seringkali triangle ada segitiga, ada *Baitul maah*nya, ada tamwilnya, ada sektor riilnya”

Gambar 4.2
Nasabah Koperasi Kanindo Syariah



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Menurut Huda dan Haykal (2010), bahwa *Baitul maal* Wat Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul maal* dan *Baitul tamwil*. Secara harfiah *Baitul maal* berarti rumah dana dan *Baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *Baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Konsep *Baitul maal* Wat Tamwil merupakan gabungan antara fungsi pengelolaan zakat infaq dan sedekah dengan fungsi bisnis yaitu fungsi tamwil, fungsi tamwil ini yang merupakan fungsi bisnis dimana LKMS merupakan lembaga intermediasi yang menjalankan bisnis dengan konsep syariah yaitu semua operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang

dilaksanakan oleh LKMS adalah bebas dari unsur riba dimana menggunakan perjanjian sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan zakat sebagai wujud fungsi sosial yang dikeluarkan oleh KANINDO Syariah Dau disalurkan untuk zakat konsumtif, zakat produktif dan beasiswa pendidikan. Selain itu ada yang berupa penghargaan *living cost* atau biaya hidup selama satu tahun kepada para santri didikdi TPQ KANINDO. Sedangkan Zakat konsumtif diwujudkan dalam bentuk sembako yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tersebar di sekitar kantor cabang/capem dan pusat. Untuk zakat produktif diwujudkan dalam bentuk pembelian barang dan modal usaha, sedang zakat beasiswa pendidikan diberikan kepada para santri TPQ yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Dari dana sosial yang terkumpul digunakan untuk berbagai aktifitas sosial. Aktifitas sosial tersebut dimanfaatkan terutama kepada masyarakat sekitar lembaga baik yang berupa materi maupun non materi. Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Untung selaku manager BMT Kanindo syariah Dau sebagai berikut:

“Jadi dari semua crew kita mulai saya sampai satpam pun setiap bulan kan dipotong 2,5% itu setiap bulan jadi gaji otomatis sudah disisihkan untuk *Baitul maal* itu satu yang kedua dari keuntungan dari laba usaha itupun kita berani mengambil keputusan yang sangat revolutioner kalo zakat itu kan 2,5% dr keuntungan”

Penggalan sumber dana untuk dana sosial juga dilakukan dengan memotong sisa hasil usaha pada lembaga keuangan. Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah harus dilaksanakan secara profesional. Prinsip profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah dapat dilihat pada sisi akuntabilitas, transparansi serta ketepatan dalam penyaluran dana tersebut. Farook (2008), menyampaikan bahwa Tiga prinsip dasar utama dalam lembaga keuangan Islam adalah bahwa manusia diciptakan sebagai

khalifah/pemimpin di muka bumi, adanya pertanggungjawaban kepada Sang Ilahi dan kewajiban dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan serta mencegah segala hal yang bersifat kemungkaran. Prinsip adanya pertanggungjawaban tersebut dimana menuntut adanya sebuah profesionalitas dalam menggali sumber dana sosial yang memang diperuntukkan untuk kegiatan sosial serta menyalurkannya kepada yang berhak menerima.

Persepsi fungsi sosial oleh pelaku LKMS salah satunya adalah sebagai pengelola zakat infaq dan sedekah. Konsep *Baitul maal* Wat Tamwil dimana fungsi *Baitul maal* adalah sebagai tempat mengumpulkan dana yang berasal dari zakat infaq dan sedekah. Dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan sosial sehingga pelaku LKMS mempersepsikan bahwa salah satu fungsi sosial adalah pengelolaan zakat infaq dan sedekah. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional maka pengumpulan dan penyaluran zakat infaq dan sedekah sesuai dengan tuntunan syariah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas terhadap penyaluran pendanaan juga merupakan salah satu unsur yang penting dalam manajemen lembaga keuangan mikro syariah. Hal tersebut dimulai dari diri manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang handal dan bertanggungjawab inilah yang penting untuk diwujudkan. Lembaga sosial yang khusus menangani fungsi zakat infaq dan sedekah relatif mudah berkembang dengan diimbangi oleh profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja tersebut dapat dilihat dari promosi dan program-program yang dilaksanakan. Dari program yang dilaksanakan kemudian dipertanggungjawabkan kepada publik maka akan timbul kepercayaan dari masyarakat untuk berzakat, infaq dan sedekah di lembaga tersebut.

Salah satu cara meningkatkan pengumpulan zakat infaq dan sedekah pada LKMS adalah dengan bermitra pada lembaga zakat tingkat nasional.

Pendapat tersebut juga di berikan oleh Bapak Farhan selaku (Manager Kanindo Syariah Cabang DAU) sebagaimana berikut:

“Waktu itu kalau berdasarkan pengalaman saya itu, lembaga social yang seperti ini (lembaga amil zakat) yang cepat mendapat pengakuan kepercayaan masyarakat itu misal yang saya contohkan itu kegiatannya murni sosial tidak ada urusan dengan simpan pinjam”.

Dengan cara tersebut, pengembangan *Baitul maal* pada LKMS dapat di tingkatkan produktifitasnya dengan bermitra pada lembaga zakat tingkat nasional. Pola kemitraan diharapkan dapat meningkatkan kinerja *Baitul maal* melalui manajemen sumber daya manusia serta manajemen pengelolaan lembaga *Baitul maal* secara profesional baik dari segi pengumpulan, pengelolaan serta penyaluran dan media media promosi yang dilaksanakan melalui lembaga zakat nasional. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Untung:

“Fungsi sosialnya ditangani oleh *Baitul maal* namanya *Baitul maal* Assalam ini sudah lebih dari lima tahun terus kemarin bulan desember 2011 kita kerjasama dgn dompet dhuafa dan kemitraan dengan mitra pengelola zakat dari dompet Duafa”

Prinsip dasar sistem keuangan Islam adalah keadilan yang terdiri dari keadilan dalam transaksi, mencegah eksploitasi antara satu dengan yang lainnya, membagi keuntungan dan kerugian antara bank dan nasabah, transaksi sebaiknya material dengan suatu tujuan ekonomi yang nyata, menjunjung tinggi kesucian kontrak (*aqad*), menghindari aktivitas keuangan yang dilarang oleh Islam, misalnya melibatkan alkohol dan perjudian

Lembaga keuangan syariah akan melakukan aktivitas sosial yang lain, misalnya membuat donasi amal. Tuhan menyediakan surga bagi Muslim yang melakukan sodaqoh. Bank Islam biasanya mengendalikan dana yang besar dan diharapkan berpartisipasi dalam dalam penyediaan donasi amal. Komunitas Islam mempunyai hak untuk mengetahui

bagaimana bank berpartisipasi dalam membantu orang fakir dan miskin. Bank harus dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan melalui zakat, *qordul hasan*, sodaqoh dan kegiatan sosial

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Menurut As-shatibi dalam P3EI UII 2009, menyebutkan bahwa mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga dan keturunan serta material. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Hubungannya dalam kegiatan di lembaga keuangan Islam, dalam melaksanakan transaksi atau memanfaatkan produk produk lembaga keuangan, maka diharapkan dapat memberikan apa yang ingin dicapai dalam pemenuhan masalah tersebut. Adanya kepuasan batin ketika melakukan transaksi tersebut akan memberikan sebuah dampak yang signifikan baik dari segi pengumpulan dana atau pelayanan.

Masyarakat dapat bertransaksi di berbagai macam lembaga keuangan salah satunya di lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Selain memanfaatkan jasa penggalangan dana dan pembiayaan, masyarakat yang menabung tentunya mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Bagi hasil dengan nisbah yang disepakati di awal merupakan konsep yang terbuka dimana keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan kinerja dan hasil dari lembaga tersebut.

4.3 Ringkasan Sinergitas

Filosofi pendirian BMT tercermin dari namanya yaitu *Baitul maal* wat-Tawmil, dimana terkandung dua pilar yaitu *Baitul maal* yang berfungsi menerima dan mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah serta mengelola pendistribusian secara efektif sehingga memberikan kemanfaatan yang optimal bagi lingkungannya, serta *Baitul tamwil* yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan sektor usaha mikro-kecil, dengan mendorong kegiatan menabung dan menopang kebutuhan pembiayaan mereka.

Pada masa sekarang, BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro, memiliki dua kelebihan. Pertama, BMT merupakan *Baitul maal* yang salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika BMT mampu mengelolanya secara amanah dan profesional. Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT. Dari sisi pendayagunaan, berbagai program kreatif sangat dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS ini, antara lain:

- (1) Pengembangan sumberdaya manusia (SDM)
- (2) Pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Makin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, BMT dapat mendirikan Lemabag Amil Zakat (LAZ) guna mengelola dana ZIS secara lebih profesional. Peningkatan peran ini bukan berarti menghilangkan fungsi *Baitul maal* pada BMT karena ini bisa dijumpatani dengan mendesain sistem sinergi antara LAZ dan BMT.

Kedua, BMT merupakan baitut tamwil. Dalam hal ini fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT harus menjalankan prinsip profesional. Dalam keadaan ini, karyawan akan dituntut kemampuan entrepreneurship yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan resiko bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun nasabahnya.

Sebagai bentuk lembaga Keuangan syariah non bank, BMT mempunyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga Keuangan bank. Menurut A.Djazuli, Yadi Janwari dan Andri Soemitra, cirri utama BMT adalah:

1. Berorientasi bisnis, **mencari laba bersama**, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil, bawah dan menengah, yang berada dilingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.

Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa BMT mempunyai dua peran sekaligus. Pertama sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai mobilisator potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini BMT berkedudukan sebagai organisasi

bisnis. Kedua adalah fungsi BMT sebagai organisasi yang juga berperan sosial, yaitu menjadi perantara antara agniya sebagai shahibul maal (orang yang mempunyai harta yang berlebihan) dengan dua'fa (orang yang kekurangan harta) sebagai mudharib (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.

Namun dalam implementasinya BMT Kanindo syariah Dau ini lebih di dominasi fungsi tamwilnya. Seperti apa yang di sampaikan oleh bapak untung dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Kalau seiring dalam arti equalnya itu dari sisi volume itu masih jauh ya, jadi tanwilnya ini sudah tumbuh dalam volume usaha yang cukup besar ya walaupun tentu kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sudah progresif itu kita masih kalah. Tapi yang mal nya ini masih karena dia banyak mehabiskan anggaran sehingga ndak pernah terjadi saldo mengendap yang besar jadi volumemya kecil terus karena memang habis dibagi-bagi untuk program-program seperti itu, beda dengan di tanwilnya kalau tanwil itu kan bisa kelihatan dari asetnya gitu kan dari pertumbuhan asetnya itu kan ada pemupukan asset dan sebagainya. Tapi kalau di *Baitul* mal ya ditunggu tunggu untuk menghabiskan untuk program bagus nya itu di programnya itu”

Gambar 4.3
Kondisi Kantor PT Kanindo Syariah



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kesenjangan antara fungsi sosial dan fungsi bisnis kanindo terlihat dari kecenderungan per
maal nya. Dan ini menunjukkan keteringgalan pertumbuhan dana ZIS dengan
pertumbuhan laba BMT .

Gambar 4.4
Peneliti Bersama Staff PT Kanondo Syariah



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kanindo syariah dengan dua pilar *Baitul maal* dan tamwilnya idealnya dapat terbangun dengan baik ,seiring dan bersinergi dalam mengembangkan lembaga serta masyarakat sekitarnya . segmen masyarakat yang menjadi sasaran Kanindo tidak semua dapat terlayani dengan fungsi bisnisnya. Masyarakat miskin berpendapatan rendah bahkan tak menentu (*dhuafa*).yang masih menghadapi masalah dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari tidak dapat terlayani dengan pembiayaan komersial Kanindo. Sementara para *aghnia* (masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu) relatif memiliki “hambatan psikologis “ untuk menggunakan jasa Kanindo . misalnya untuk simpan pinjam , di mana mereka akan cenderung memilih menggunakan jasa perbankan untuk kebutuhan layanan keuangan.

Oleh karena itu, permasalahan kesenjangan antara kepentingan masyarakat yang belum terlayani dengan fungsi bisnis yang sekarang dijalankan perlu dijembatani dengan penguatan fungsi sosial Kanindo. Dengan penguatan fungsi sosial tersebut, diharapkan masyarakat miskin dapat terlayani dengan dana-dana kebajikan, atas dasar semangat untuk pemberdayaan, peningkatan taraf kehidupan .serta kemandirian ekonominya. Disamping itu para *aghnia* dan juga pengusaha-pengusaha disekitarnya dapat memanfaatkan layanan Kanindo dalam menyalurkan dana ZIS untuk didistribusikan secara lebih tepat dan manfaat, sehingga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat .

Di samping itu, kebijakan kebijakan pengurus dan penegelola hendaknya mulai menyentuh sektor maal, baik pada tataran target atau proyeksi ke depan, maupun penyediaan petunjuk pelaksanaan fungsi sosial tersebut. Motivasi para pengurus dan pengelola Kanindo perlu ditingkatkan dengan mengkaji kembali

pentingnya fungsi tersebut dalam memberdayakan masyarakat serta mengerakkan ekonomi rakyat disekitarnya, yang pada giliranya dapat mendorong pertumbuhan bisnis Kanindo itu sendiri. Termasuk juga mengkaji kembali filosofi Kanindo sebagai sebuah lembaga yang membawa misi *muamallah* dalam Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dalam masayrakat.

Untuk mendorong penguatan fungsi sosial Kanidno adalah peningkatan kapasistas staf atau karyawanya, termasuk juga personal pengurus. melalui pelatiha-pelatihan yang di selenggarakan secara internal atau mengikuti pelatihan eksternal, di harapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya fungsi sosial dari *Baitul maal* nya. sekaligus meningkatkan kapasitas personilnya untuk melaksanakan fungsi tersebut .Lembaga pendamping Kanindo juga perlu melakukan asistensi terhadap fungsi sosial Baitu Maalnya .dalam hal ini kanindo perlu bersinergi dengan lemabaga pengelola zakat yang dan telah berkembang lebih dahulu.

Jika dalam hal jumlah karyawan Kanindo masih kekurangan untuk menjalankan fungsi sosialnya, seyogyanya di pertimbangkan kembali untuk merekrut tenaga (staf) baru yang memiliki kemauan serta kompetensi untuk menggalang, mengelola, hingga mendistribusikan dan zakat, infaq, shadaqh dari masyarakat perseorangan maupun pengusaha di wilayah kerrja Kanindo yang bersangkutan, sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Terkait kualifikasi insan Kanindo ini, penting di penanaman kesadaran akan fungsi dan keberadaan Kanindo bagi mayoritas masyrakat yang masih menghadapi problem kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, sehingga insan Kanindo tidak “terindoktrinasi” dengan pola pikir kapitalisme yang semata-mata bertujuan mengejar keuntungan. Metode training bagi insan yang ada di Kanindo dapat dikembangkan dalam rangka memupuk kesadaran bahwa aktivitas

ekonomi dalam islam tidak boleh lepas dari konteks beramal dan beribadah kepada Allah SWT.

Pentingnya kesadaran dan keterampilan tersebut telah di buktikan lembaga mikro Grameen Bank Bangladesh yang di bangun muhammad yunus . pekerjaan di bank kaum miskin adalah pekerjaan yang sangat spesial ,kami latih staf kami untuk menjadikan mereka sebagai brigade elite pejuang anti kemiskinan (Yunus,2007).

Hal lain yang perlu di benahi adalah perlu adanya panduan atau standar operasi bagi Kanindo dalam menjalankan fungsi sosialnya. Standarisasi operasi fungsi sosial Kanindo ini dapat dibuat secara internal untuk masing-masing Kanindo, atau dapat difasilitasi oleh lembaga pendamping yang nantinya akan menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengerakkan baitu Maalnya ,panduan tersebut paling tidak dapat menjadi acuan staf nya dalam mengelola dana ZIS, baik aspek syariah maupun operasional penghimpun dan penyaluran kepada yang bentuk syariah dan amanah.

Fungsi sosial tentu hanya berjalan dengan tersedianya dana yang memang di peruntukkan bagi fungsi tersebut. Pertama tentu sumber dana dari internal Kanindo yang bersumber dari keuangan lembaga setiap tahun serta zakat dari anggota,pengurus,serta karyawan Kanindo atau infaq dan shadaqah.

Satu hal penting dalam rangka mengerakkan *Baitul maal* ini adalah faktor kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dan menyalurkan melalui lembaga pengelola khususnya BMT. Berdasarkan pendapat responden dalam penelitian, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lembaga ini cenderung rendah. Masyarakat cenderung menyalurkan dananya ZIS nya secara perseorangan kepada kerabat atau orang-orang yang di tentukanya sendiri.

Hal lain yang di luar kendali atau wewenang pengelola Kanindo, adalah lingkungan peraturan pemerintah terkait kewenangan (legalitas) BMT untuk

mengelola dana ZIS maupun lembaga pengelola zakat yang tumbuh dari masyarakat secara umum. Hal ini dirasakan sebagai pengelola BMT berpengaruh terhadap upaya lembaga dalam melakukan penggalangan dan pendistribusian dana ZIS dari masyarakat khususnya kalangan pengusaha.

Faktor kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah Kanindo juga masih menjadi problem dikarenakan masih banyak orang-orang yang terdaftar sebagai nasabah lembaga keuangan syariah berdasarkan latar belakang dalam lembaga keuangan syariah tersebut, contohnya Lagziz dengan latar belakang muhammadiyah dan sejenisnya.

Regulasi dalam hal ini adalah undang-undang tentang zakat yang sedang dibahas oleh pemerintah. Hal ini perlu dibahas oleh pengelola BMT bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah pengelolaan zakat di tanah air, juga tidak menutup kemungkinan pembahasan mengenai bentuk badan hukum yang tepat bagi lembaga ini, yang lebih menjamin terselenggaranya dua pilar BMT secara optimal di banding dengan badan hukum koperasi seperti sekarang ini.

5.2 Saran

Dalam rangka penguatan fungsi sosial tersebut, khususnya bagi Kanindo Syariah Malang ini, maka pertama perlu dilakukan pembenahan manajemen lembaga. Kehadiran Kanindo secara kelembagaan perlu disiapkan untuk menjalankan dua peran dalam masyarakat, yaitu peran untuk mengembangkan sektor produktif dan kebutuhan konsumtif melalui fungsi *tamwil*, serta peran untuk memberdayakan kaum dhuafa untuk lebih terjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya dan lebih berdaya melalui fungsi *maal*.

Pembenahan manajemen yang dapat dilakukan adalah menyusun dan menyepakati antar anggota, pengurus, serta pengelola tentang indikator indikator

keberhasilan pengelolaan Kanindo, yang tidak hanya terfokus pada ukuran komersial (laba), melainkan juga indikator dalam pelaksanaan fungsi-fungsi sosial, seperti pemberdayaan kaum dhuafa melalui pemanfaatan dana ZIS.

Oleh karena itu, perlu dipersiapkan infrastruktur pendukungnya, mulai dari rekrutmen tenaga yang khusus menangani fungsi sosial tersebut, sarana administrasi, evaluasi, dan penyusunan struktur organisasi yang mengakomodasi *Baitul maal* sebagai unit bagian khusus untuk menangani masalah tersebut, dan menjamin struktur organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dukungan sarana-prasarana yang dibutuhkan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Baitul maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* pada yang lebih mengarah pada fungsi sosial lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* yang lebih megarah pada fungsi bisnis lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sector masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul maal wa Tamwil* (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansil bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mkro konvensional lainnya (Masyitoh, 2014).

Bait al-maal wa tamwil adalah fenomena tahun 1990-an, kurang lebih 31 tahun yang lalu namun telah nyata memberikan andil yang cukup konkrit dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Sedangkan UKM dengan berbagai macam

kendalanya juga akan demikian keadaannya. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran

Baitul maal wa Tamwil merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah paling sederhana yang saat ini banyak muncul dan tenggelam di Indonesia. Keberadaan BMT dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak di dukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan bubar. Beberapa data menunjukkan di daerah-daerah tertentu keberadaan BMT cukup memprihatinkan.

Kondisi tersebut dikarenakan ketimpangan fungsi utama BMT, antara *Baitul maal* dan *Baitul tamwil*, dan juga ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan BMT dan operasionalisasi di lapangan, serta banyaknya kasus pembiayaan macet adalah kendala yang seringkali dihadapi oleh BMT. Dalam perkembangan BMT tentunya memang tidak lepas dari berbagai kendala ini walaupun tidak berlaku penuh kendala ini di suatu BMT. Banyak contoh kasus tersendatnya kinerja BMT akibat ketimpangan fungsi antara *Baitul maal* dan *Baitul tamwil*.

Pada umumnya pangsa pasar BMT adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kondisi UMKM terkini banyak kendala atau permasalahan

diantaranya kualitas sumber daya manusia UMKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirusahaan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja.

Banyak UMKM yang masih belum memiliki badan hukum yang jelas, kurangnya inovasi produk yang mana UMKM dinilai masih kurang menguasai teknologi manajemen, informasi, dan pasar. Ditambah lagi UMKM juga masih menghadapi kendala dalam hal akses modal dan pendanaan akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Semua itu dikarenakan kurangnya tenaga pendamping di lapangan yang menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh. Timbulnya beragam permasalahan sangat berkaitan erat dengan keberadaan pendamping dan fasilitator di dalam mendampingi UMKM (Sindo.com, 2010, diakses pada tanggal 23 Mei 2017).

Pada kondisi itulah peranan BMT sangat dibutuhkan baik dari sisi fungsi sosial dan juga sisi fungsi bisnis yang ada di Lembaga keuangan syariah, akan tetapi kondisi di dalamnya sendiri belum begitu baik ideal di sisi internal sendiri. BMT yang mempunyai dua fungsi berbeda dan harus berjalan beriringan harusnya mampu mengerakkan dan meningkatkan daya saing sektor UMKM dan memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Tentu hal ini tidak akan bisa terwujud ketika perananan *Baitul maal* dan *Baitul tamwil* hanya berfungsi secara parsial tidak berfungsi secara integral.

Salah satu lembaga Keuangan yang berlandaskan syariah di Jawa timur adalah koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur. Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam dalam bidang pemberdayaan

ekonomi umat Islam. Kanindo syariah berjuang untuk membebaskan umat Islam dari sistem ekonomi kapitalis ribawi menuju keadilan umat. Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah yang berdomisili di Kabupaten Malang dirintis pendirinya sejak bulan September 1998 oleh beberapa aktifis gerakan koperasi, LSM, dan tokoh masyarakat yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. KANINDO Syariah didirikan dalam rangka menggalang kekuatan kolektif masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari petani, peternak, pedagang, industri kecil, pengrajin dan wirausahawan lainnya.

Jumlah anggota/calon anggota yang dilayani sebanyak kurang lebih 5000 orang tersebar di wilayah Malang Raya, yaitu Kab. Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Sedangkan aset yang dikelola oleh KANINDO Syari'ah Malang Jatim kurang lebih sebesar Rp.24.000.000.000; Anggota KANINDO Syari'ah Malang Jatim dengan Badan Hukum Provinsi untuk sementara tersebar di wilayah Malang Raya untuk menunjang pelayanan anggota dan calon anggota agar lebih optimal. KANINDO Syariah Malang Jatim membuka delapan Kantor Cabang dan satu Cabang pembantu.

Salah satu penghambat keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sulitnya mendapatkan modal yang jelas. Sementara itu dalam dunia lembaga keuangan syariah ada istilah kredit yang dikenal dengan nama pembiayaan. Salah satu sistem pembiayaan dalam *Baitul maal wa Tamwil* (BMT) adalah *Al Mudharabah* (Bagi Hasil). Sifat pembiayaan ini tidak saling merugikan karena modal sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT dan nasabah hanya menjalankan operasional usahanya. Dalam pemberian pinjamannya kepada nasabah KANINDO Syari'ah Cabang DAU- Malang menilai dari beberapa aspek diantaranya adalah aspek legalitas, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek

manajemen dan keuangan. Tujuan dari analisis tersebut untuk menghindari terjadinya kredit macet.

Adanya kondisi seperti ini, maka peneliti berminat untuk menggali seberapa jauh Kanindo syariah di dalam menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada Baitu Mal dan *Baitul tamwil*, dan sinergisitas diantara keduanya. Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini yaitu : **“Telaah Kritis Sinergisitas Fungsi Sosial *Baitul maal* dan Fungsi Bisnis *Baitul tamwil* pada Kanindo Syariah”**.



1.2. Rumusan Masalah

Melihat kondisi yang telah di sebutkan pada latar belakang di atas, Bagaimana sinergisitas fungsi sosial *Baitul Mal* dan fungsi bisnis *Baitul tamwil* pada Kanindo syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergisitas antara fungsi sosial *Baitul Mal* dan fungsi bisnis *Baitul tamwil* pada Kanindo syariah.

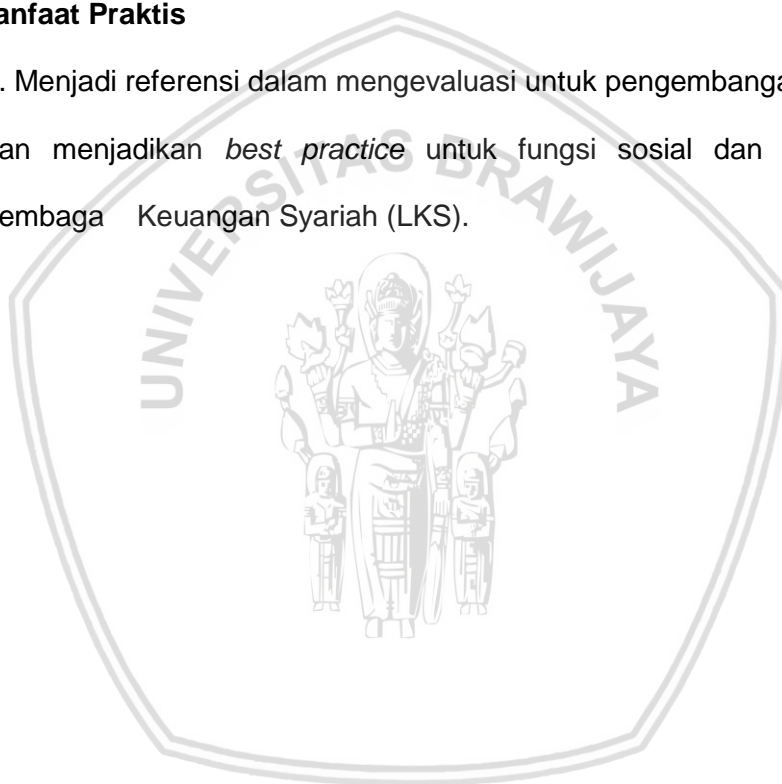
1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Menjadi acuan ilmiah dalam mengembangkan konsep fungsi sosial dan fungsi bisnis pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Menjadi referensi dalam mengevaluasi untuk pengembangan, perbaikan dan menjadikan *best practice* untuk fungsi sosial dan bisnis pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	V
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	VI
HALAMAN KATA PENGANTAR	VII
Daftar isi	VIII
HALAMAN ABSTRAKSI	IX
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Lembaga Keuangan Syariah	7
2.1.1 Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	9
2.1.1.1 Lembaga Keuangan Bank.....	9
2.1.1.2 Lembaga Keuangan Bank.....	10
2.2 Perkembangan BMT	11
2.2.1 Perkembangan Baitul Mal Wa Tamwil di Indonesia	11
2.2.2 Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil	13

2.2.3 Karateristik Baitul Mal Wa Tamwil	15
2.2.4. Fungsi BMT	15
2.2.5. Peranan BMT	17
2.2.6 Prinsip -prinsip Utama BMT	18
2.2.7 Akad,Produk Dana Dan jenis usaha Pembiayaan BMT.....	18
2.3 Produk Baitul Mal Wa Tamwil	20
2.3.1 Produk Tabungan	21
2.3.1.1 Mudharabah	22
2.3.1.1 Murahabah	26
2.3.2 Produk Pembiayaan BMT.....	30
2.4 Fungsi Bisnis BMT	31
2.4.1 Produksi.....	31
2.4.2 Pendapatan.....	33
2.5 Fungsi Sosial BMT	34
2.6 Penelitian Terdahulu	45
2.7 Kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Jenis dan Sumber Data	48
3.3 Unit Analisis dan Penentuan Informan	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Teknik Analisis Data	52
3.6 Pengecekan Keabsahan Data	54

BAB IV SINERGITAS FUNGSI SOSIAL DAN BISNIS

4.1 Fungsi Bisnis.....	56
4.2 Fungsi Sosial	60
4.3 Ringkasan Ssinergitas	62

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	73
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	80
-----------------------	-----------

